

Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah BPKAD Kabupaten Pali Sumatera Selatan

Oleh: **Intan Putri Damaiyanti^{1*}, Meti Zuliyana², Dwi Septa Aryani³**
¹²³(Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tridinanti)
Email: *¹intanputridamaiyanti2001120064@gmail.com, ²metizuliyana@gmail.com,
³dwi_septa_aryani@univ-tridinanti.ac.id

Diterima: 1 Maret 2024

| Revisi: 1 Mei 2024

| Diterbitkan: 30 Juni 2024

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Pada BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah) Kabupaten Pali Sumatera Selatan. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai BPKAD Kabupaten Pali Sumatera Selatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel yaitu pegawai bagian keuangan BPKAD Kabupaten Pali Sumatera Selatan yang berjumlah 30 orang. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana. Hasil uji hipotesis t menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas Publik memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 \leq 0,05$ dengan perolehan thitung $5,418 \geq 2,048$ ttabel sehingga dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Publik berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah BPKAD Kabupaten Pali Sumatera Selatan. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,512 sehingga disimpulkan bahwa kemampuan Akuntabilitas Publik untuk mempengaruhi Kinerja aparat adalah sebesar 51,2% sedangkan sisanya 48,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas jumlah sampel yang diteliti dengan menambahkan variabel lainnya yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Kata Kunci: Akuntabilitas Publik; Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

The Influence of Public Accountability on the Performance of BPKAD Regional Government Officials, Pali Regency, South Sumatra

Abstract—This research aims to find out how Public Accountability can influence the Performance of Regional Government Officials at BPKAD (Regional Financial and Asset Management Agency) Pali Regency, South Sumatra. The population of this study were all BPKAD employees of Pali Regency, South Sumatra. In this research, the author used a sample of 30 employees from the BPKAD finance department, Pali Regency, South Sumatra. The sampling technique uses purposive sampling. The data analysis technique used in this research is simple linear regression analysis. The results of the t-hypothesis test showed that the Public Accountability variable has a significance value of $0.000 \leq 0.05$ with a t count of $5.418 \geq 2.048$ t table so it can be concluded that Public Accountability has a partial effect on the Performance of BPKAD Regional Government Officials, Pali Regency, South Sumatra. The coefficient of determination value is 0.512, so it can be concluded that the ability of Public Accountability to influence officers' performance is 51.2% while the remaining 48.8% is influenced by other factors not researched. For future researchers, it is recommended to expand the number of samples studied by adding other variables, namely Clarity of Budget Targets and Government Internal Control System (SPIP).

Keywords: Public Accountability; Performance of Regional Government Officials

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang efektif merupakan hasil dari upaya berkelanjutan dalam membangun negara sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam perjalanan mencapai keberhasilan tersebut, Setiap pemerintah perlu memiliki keterampilan dalam mengelola sumber daya negaranya, termasuk aspek keuangan (Nugraeni & Budiantara, 2015). Dalam kurun waktu yang relatif singkat, bidang akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang signifikan. Saat ini, terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh entitas pemerintah, BUMN/BUMD, serta berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Dalam upaya menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), penting untuk melaksanakan kegiatan dengan akuntabilitas yang tepat, transparan, terukur, dan sesuai dengan peraturan hukum, sambil memberikan manfaat dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kesesuaian. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi kewajiban berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengenai pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja merupakan elemen yang mendukung evaluasi hasil kerja suatu

organisasi. Dengan melihat kinerja, dapat diketahui apakah suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuannya atau masih dalam proses pencapaian.

Menurut (Hasibuan et al., 2022) kinerja aparatur merujuk pada hasil atau tingkat keberhasilan yang dapat dicapai seseorang dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan kriteria yang berlaku untuk pekerjaan tersebut.

Untuk mencapai kinerja yang optimal, terutama bagi seorang aparatur, diperlukan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, selain sikap positif terhadap profesi, produktivitas kerja yang tinggi, dan dedikasi penuh dalam menjalankan tugas sehari-hari. Tanpa hal-hal tersebut, ada risiko kariernya terhambat atau tertinggal oleh mereka yang mampu mengoptimalkan kreativitas mereka. Kesadaran akan pentingnya sumber daya manusia mendorong organisasi, terutama melalui pimpinan, untuk menanamkan norma perilaku, nilai-nilai, dan keyakinan yang dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kinerja.

Keberhasilan atau kegagalan dalam kinerja aparatur pemerintah akan mendorong peningkatan pada indikator tertentu. Sementara itu, untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kerja aparatur pemerintah yang sukses, apresiasi diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan mendapatkan dukungan dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah (Rosita & Asrini, 2022). Peran kinerja aparatur daerah telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menekankan perlunya peningkatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang

efektif dan efisien. Hal ini karena pengukuran kinerja menjadi landasan untuk menilai pencapaian suatu organisasi, dan evaluasi ini sangat penting dalam mencapai perubahan di sektor publik.

Salah satu indikator utama yang dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja aparat adalah Akuntabilitas Publik. Akuntabilitas publik merupakan tanggung jawab pihak yang ditugaskan (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan yang menjadi kewajibannya kepada pihak yang memberikan tugas (prinsipal), dalam hal ini prinsipal memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2021).

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa akuntabilitas mencakup pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan, dengan tujuan mencapai target yang telah ditetapkan secara berkala.

Akuntabilitas publik pada pemerintah berperan dalam memberikan dukungan kepada masyarakat untuk memahami rencana anggaran, penggunaan dana, pelaksanaan program, dan kegiatan yang terjadi di lingkungan pemerintah. Dengan demikian, hal ini bertujuan agar pemerintah dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat (Candrakusuma, D. A. Jatmiko, 2017).

(Ermino, 2018) menyatakan bahwa akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap

keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai visi dan misinya guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi melalui penilaian yang dilakukan secara berkala. Pada konteks organisasi publik, para pejabat pemerintah diwajibkan mematuhi prinsip akuntabilitas publik, khususnya dalam akuntabilitas kebijakan. Keberhasilan dalam mencapai tingkat akuntabilitas yang tinggi oleh aparat daerah dapat berpotensi meningkatkan produktivitas kinerja aparat secara keseluruhan.

Pemerintah Indonesia menggunakan APBN dan APBD sebagai instrumen fiskal untuk mendukung perekonomian nasional (Indriani, 2022). APBD yang disusun dan dikelola secara transparan memungkinkan publik untuk mengetahui bagaimana uang mereka digunakan. Transparansi ini mencakup proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan penggunaan dana.

Dalam ranah administrasi pemerintahan, terdapat peraturan perundangan yang telah dikeluarkan, yakni Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara (SK. LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003, yang mengatur Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini merupakan salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah guna meningkatkan implementasi tata pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Melalui berbagai peraturan perundangan tersebut, diharapkan dapat terwujud akuntabilitas publik terhadap kinerja aparatur pemerintah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Iswan, 2023) terungkap bahwa

Akuntabilitas Publik memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja aparatur di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian yang dilakukan oleh (Puspitasari, 2020) juga menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah desa di Desa Srimartani.

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pali pada bulan Desember 2023 sampai dengan Februari 2024. BPKAD Kabupaten Pali sebagai salah satu OPD pengelolaan keuangan, dalam mencapai tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi oleh seluruh pelaku pembangunan sehingga mampu memecahkan berbagai permasalahan dan memajukan daerah melalui peningkatan kinerja aparat. Pencapaian akuntabilitas kinerja BPKAD Kabupaten Pali tahun 2022 dalam laporan Pengukuran Kegiatan Kinerja (PKK) memiliki anggaran sebesar Rp. 183.349.841.880, dan realisasinya sebesar Rp. 170.853.754.552. Dengan demikian, rata-rata pencapaian kinerja sebesar 93,15% sehingga menggambarkan bahwa tingkat keberhasilan BPKAD Pali sebagai OPD pengelola keuangan dinilai baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, ditemukan kendala dalam pengoptimalan rencana kegiatan dikarenakan persentase realisasi masih dibawah 100% sehingga dapat dikatakan realisasi anggaran tersebut belum sepenuhnya efisien maka dari itu, diperlukan penelitian lebih lanjut

untuk mengusulkan rencana kegiatan yang akan datang sehingga tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan dapat lebih optimal dibandingkan tahun sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Berapa besar Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Pada BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah) Kabupaten Pali Sumatera Selatan.

METODE PENELITIAN

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Dalam penelitian ini penulis menggunakan populasi yaitu seluruh pegawai BPKAD Kabupaten Pali Sumatera Selatan yang berjumlah 77 orang. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pegawai bagian keuangan BPKAD Kabupaten Pali Sumatera Selatan yang berjumlah 30 orang. Adapun teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kuantitatif yang meliputi uji validitas & uji reliabilitas, uji normalitas, uji hipotesis (parsial), uji koefisien korelasi, serta analisis koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil Uji Validitas

Tabel 1. Uji Validitas Akuntabilitas Publik

Item	Rhitung	rtabel	Keterangan
P1	0,792	0,3610	Valid
P2	0,845	0,3610	Valid
P3	0,908	0,3610	Valid
P4	0,905	0,3610	Valid
P5	0,844	0,3610	Valid
P6	0,860	0,3610	Valid
P7	0,881	0,3610	Valid
P8	0,789	0,3610	Valid

(Sumber : Data diolah, 2024)

Hasil pengujian validitas pada 8 item pertanyaan variabel Akuntabilitas Publik menunjukkan bahwa $r_{hitung} \geq r_{tabel}$

sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan valid.

Tabel 2. Uji Validitas Kinerja Aparatur

Item	rhitung	rtabel	Keterangan
P1	0,739	0,3610	Valid
P2	0,763	0,3610	Valid
P3	0,801	0,3610	Valid
P4	0,843	0,3610	Valid
P5	0,921	0,3610	Valid
P6	0,902	0,3610	Valid
P7	0,865	0,3610	Valid
P8	0,747	0,3610	Valid

(Sumber : Data diolah, 2024)

Hasil pengujian validitas pada 8 item pertanyaan variabel Kinerja Aparatur menunjukkan bahwa $r_{hitung} \geq r_{tabel}$

sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's alpha	Standar	Keterangan
X	0,947	0,600	Reliabel
Y	0,932	0,600	Reliabel

(Sumber : Data diolah, 2024)

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* variabel Pemahaman Akuntabilitas Publik dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah lebih dari standar 0,600 sehingga dapat

disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan masing-masing variabel diatas memiliki jawaban yang konsisten.

Hasil Uji Normalitas

Tabel 4. Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		<i>Unstandardized Residual</i>
	<i>N</i>	30
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	5.26959725
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.106
	<i>Positive</i>	.098
	<i>Negative</i>	-.106
<i>Test Statistic</i>		.106
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.200 ^{c,d}
<i>a. Test distribution is Normal.</i>		
<i>b. Calculated from data.</i>		
<i>c. Lilliefors Significance Correction.</i>		
<i>d. This is a lower bound of the true significance.</i>		

(Sumber : Data diolah, 2024)

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji *kolmogorov smirnov* yang ditunjukkan dengan *Asymp. Sig. 2 tailed* sebesar 0,200 sehingga dapat

disimpulkan bahwa data berdistribusi dengan normal.

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

Tabel 5. Uji Regresi Sederhana

<i>Coefficients^a</i>			
<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>	
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>
1	<i>(Constant)</i>	6.087	4.006
	<i>Akuntabilitas Publik</i>	.851	.157

a. Dependent Variable: Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

(Sumber : Data diolah, 2024)

$$Y = 6,087 + 0,851 X1 + e$$

Adapun penjelasan persamaan diatas yaitu sebagai berikut :

1. Konstanta bernilai positif sebesar 6,087, artinya Kinerja Aparat akan

memiliki nilai 6,087 jika variabel bebas yaitu Akuntabilitas Publik bernilai 0.

2. Koefisien regresi variabel Akuntabilitas Publik bernilai positif

sebesar 0,851. Nilai tersebut menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan Akuntabilitas Publik

sebesar satu-satuan, maka Kinerja Aparat akan meningkat sebesar 0,851.

Hasil Uji Parsial

Tabel 6. Uji Parsial

<i>Coefficients^a</i>					
<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
<i>1 (Constant)</i>	6.087	4.006		1.519	.140
<i>Akuntabilitas Publik</i>	.851	.157	.715	5.418	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

(Sumber : Data di olah, 2024)

Nilai signifikansi variabel Akuntabilitas Publik sebesar $0,000 \leq 0,05$ dengan perolehan $t_{hitung} 5,418 \geq 2,048 t_{tabel}$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Publik berpengaruh secara

parsial terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah BPKAD Kabupaten Pali Sumatera Selatan.

Hasil Koefisien Korelasi dan Determinasi

Tabel 7. Uji Korelasi dan Determinasi

<i>Model Summary^b</i>				
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.715 ^a	.512	.494	5.363

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas Publik

b. Dependent Variable: Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

(Sumber : Data di olah, 2024)

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil analisis koefisien korelasi (R) yang diperoleh sebesar 0,715, sehingga terjadi hubungan dengan tingkat hubungan kuat dalam model regresi penelitian ini. Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,512 sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan Akuntabilitas Publik dalam mempengaruhi Kinerja Aparat Pemerintah Daerah sebesar 51,2%, sedangkan sisanya sebesar 48,8%

dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti.

Pembahasan

Pengaruh Akuntabilitas Publik Secara Parsial Terhadap Kinerja Aparat.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas Publik Berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah BPKAD Kabupaten

Pali Sumatera Selatan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Putra (2014). Sedangkan penelitian yang dilakukan Nabila (2022) menyatakan bahwa Akuntabilitas Publik tidak berpengaruh terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.

Pentingnya akuntabilitas publik dalam meningkatkan kinerja manajerial sangat ditegaskan, karena melalui akuntabilitas kepada masyarakat, tidak hanya anggaran yang diketahui, tetapi juga pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan. Ini mendorong pemerintah daerah untuk berupaya dengan maksimal dalam menjalankan semua perencanaan yang telah dibuat, karena mereka akan dievaluasi dan diawasi oleh masyarakat. Dengan adanya mekanisme akuntabilitas, para aparat pemerintah daerah merasa bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Mereka menyadari bahwa mereka harus menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap langkah yang mereka ambil kepada publik, yang dapat mendorong mereka untuk bekerja lebih keras dan melakukan tugas mereka dengan lebih baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan analisis statistik yang dilakukan, nilai signifikansi variabel Akuntabilitas Publik adalah 0,000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang umumnya digunakan yaitu 0,05. Selain itu, perolehan thitung sebesar 5,418 lebih besar dari ttabel yang bernilai 2,048. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Publik

berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah BPKAD Kabupaten Pali Sumatera Selatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dan turut membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Candrakusuma, D. A. Jatmiko, B. (2017). *Dampak komitmen organisasi, sistem pengendalian intern pemerintah, akuntabilitas publik, partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial. Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*.
- Ermino, R. (2018). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Akuntabilitas, Transparansi, dan Penerapan Sistem Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau). Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 18(2)*, 181.
- Fahisa, M., & Afriyenti, M. (2023). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa: Studi Empiris pada Nagari di Kabupaten Tanah Datar. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 5(745-757)*.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hasibuan, M. R., Harahap, R. H., & Humaizi, H. (2022). *Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kinerja Anggota Badan Permusyawaratan Desa di*

- Desa Mananti Sosa Jae. Perspektif*, 11(2), 674–691.
- Indriani, I. K. (2022). *Kondisi Kapasitas Anggaran Pemerintah Kota di Indonesia-Studi Proyeksi Menghadapi Pandemi COVID-19*. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 6(2), 156–168.
- Iswan, S. M. A. (2023). *Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Aparatur Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan*. *Insan Cita Bongaya Research Journal*, 159–168.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Empa). Penerbit Andi.
- Nugraeni, N., & Budiantara, M. (2015). *Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Kinerja*. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 12(1)
- Nurkolis & Moh. Khusaini. (2019). *Penganggaran Sektor Publik*. Malang : UB Press
- Puspitasari, B. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kemampuan Kerja, Budaya Organisasi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Desa Srimartani Kecamatan Piyungan)*. Universitas Ahmad Dahlan.
- Rosita, R., & Asrini, A. (2022). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Provinsi Jambi)*. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 7(1), 133–141.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Umam, M. S., & Setiyowati, A. D. (2023). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Komitmen Aparatur, Kepatuhan Pada Regulasi Terhadap Kinerja Aparatur Daerah*. *InFestasi*, 19(1), 91–102.